

BAB 3

PERAN PEMERINTAH JEPANG DALAM BIDANG PENDIDIKAN PADA MASA PENDUDUKAN SEKUTU

Dengan menyerahkan seluruh kedaulatannya kepada Sekutu, Jepang memasuki periode dimana fungsi sebagai pembuat kebijakan tidak lagi menjadi wewenang mereka. Sebagai negara yang dikuasai oleh negara lain, Jepang berharap dapat memberikan pengaruh dalam perumusan kebijakan sekutu dan juga memberikan pengaruh kepada masyarakat Jepang agar dapat melaksanakan kebijakan tersebut dalam kehidupan mereka melalui pendekatan politik.³¹

Tujuan sistem pendidikan Jepang sebelum perang adalah untuk melatih orang-orang agar memberikan jasa kepada bangsanya. Di bawah Kementerian Pendidikan di Tokyo, sekolah-sekolah diajarkan keunggulan dari negara Jepang, dan inisiatif dari individu dihilangkan. Pengembangan pendidikan didasarkan pada baik atau buruknya kepatuhan dan penyesuaian diri. Pada akhir tahun 1920-an, pelatihan militer diperkenalkan di sekolah-sekolah dan semangat nasionalisme dikembangkan melalui murid-murid.

Setelah mengalami kehancuran akibat kekalahan pada Perang Dunia II, di bawah pendudukan Sekutu, pendidikan Jepang diarahkan kepada pendidikan yang lebih demokratis. Hal pertama yang ditanyakan Kaisar ketika kalah perang pun bukanlah kerugian yang diderita melainkan berapa banyak guru yang tersisa.³² Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi masyarakat Jepang.

Pendidikan, menurut FEC harus dilihat sebagai pencarian kebenaran dan sebagai persiapan hidup dalam negara yang demokratis. Perhatian harus diletakkan pada martabat dan harga diri seseorang, pada pemikiran yang bebas

³¹ Edward R. Beauchamp, *Windows on Japanese Education* (New York : 1991), hlm.30

³² http://batampos.co.id/metro/Metro/pandangan_mata_-_Ilmu.html., diakses pada tanggal 1 Juli 2009 pukul 23.10. Penulis adalah Riza Fahlevi, Batam Pos

dan berinisiatif, serta pada semangat untuk melakukan penelitian-penelitian.³³ Oleh karena itu, berbagai kebijakan dalam bidang pendidikan dikeluarkan oleh SCAP selaku pelaksana kebijakan Sekutu di Jepang untuk memberikan pendidikan yang lebih demokratis bagi seluruh masyarakat Jepang.

Pemerintah Jepang yang berada di bawah kendali pihak Sekutu dan secara langsung berada di bawah wewenang SCAP juga mempunyai peranan-peranan di dalam setiap kebijakan yang diterapkan oleh sekutu, termasuk dalam bidang pendidikan.

3.1 Kebijakan Pendidikan Pembangunan Jepang Baru atau *Shin Nihon Kensetsu no Kyōiku Hōshin* (新日本建設の教育方針)

Pada tanggal 15 September 1945, sesaat setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Kementerian Pendidikan Jepang dengan menterinya Tamon Maeda, mengeluarkan Kebijakan Pendidikan Pembangunan Jepang Baru atau *Shin Nihon Kensetsu no Kyōiku Hōshin* (新日本建設の教育方針). Kebijakan pendidikan yang baru ini terdiri dari 11 pasal yaitu :

1. Kebijakan Pendidikan yang baru : meningkatkan pendidikan masyarakat Jepang dan meningkatkan kecintaan terhadap perdamaian.
2. Sistem Pendidikan : pendidikan militer di sekolah dihilangkan.
3. Buku Teks : merevisi buku teks.
4. Undang-undang untuk guru dan staf : pendidikan ulang bagi para guru.
5. Undang-undang sekolah : siswa diperbolehkan untuk pindah sekolah dan jurusan pendidikan.
6. Pendidikan Ilmu Pengetahuan : Kementrian Pendidikan memperkenalkan pendidikan yang berdasar pada kebenaran ilmu pengetahuan.
7. Pendidikan Sosial : meningkatkan moral masyarakat
8. Asosiasi Pemuda : membentuk relawan local yang akan mengaturnasosiasi pemuda daerah.
9. Agama : meningkatkan semangat keagamaan
10. Pendidikan Olah Raga : meningkatkan pendidikan olah raga dan mengadakan pertandingan-pertandingan olah raga.

³³ Robert A. Fearey, *Occupation of Japan, Second Phase : 1945-1950* (New York : 1950), hlm.34

11. Reformasi Kementrian Pendidikan Jepang³⁴ : perubahan struktur Kementrian Pendidikan Jepang.³⁵

Tujuan Kebijakan Pendidikan Pembangunan Jepang Baru ini secara prinsip adalah untuk menyediakan dasar-dasar dalam pendidikan segera setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Kebijakan Pendidikan Pembangunan Jepang Baru ini juga menunjukkan ada inisiatif dari pemerintah Jepang untuk membangun demokrasi di negaranya.

Ketika kebijakan ini dikeluarkan, Harold C. Henderson, anggota Badan Pemerintahan GHQ bertemu dengan Maeda dan mengatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan Maeda ini sangat baik, dan mendukung Maeda untuk melanjutkannya.³⁶ Kesamaan pandangan antara Henderson dan Maeda ini mengindikasikan ada kesamaan pandangan antara Sekutu dan Jepang dalam melakukan pembaharuan di dalam pendidikan Jepang.

Inisiatif Jepang untuk membuat kebijakan pendidikan yang baru setelah penyerahan Jepang kepada Sekutu ini juga didukung oleh SCAP. Jendral Douglas MacArthur menganggap bahwa reformasi setelah perang di Jepang harus dilaksanakan dengan keinginan masyarakat Jepang sendiri. MacArthur meyakini bahwa demokrasi akan lebih baik jika dilahirkan dari dalam diri masyarakat Jepang, daripada dilakukan dengan paksaan dari luar.³⁷ Kebijakan pendudukan dari awal didasarkan pada prinsip bahwa reformasi masyarakat Jepang harus diselesaikan oleh orang-orang Jepang sendiri, dan fungsi dari GHQ dan pasukan pendudukan bukan untuk memerintah Jepang tetapi untuk mengawasi usaha Jepang melakukan reformasi dalam diri mereka. Selain itu, jika demokrasi dilakukan dengan paksa, hasilnya hanya akan bertahan sementara saja.

Inisiatif Pemerintah Jepang di dalam membuat kebijakan pendidikan Jepang yang baru ini juga mengacu kepada Deklarasi Potsdam butir ke-12 yang menyatakan :

“The occupying forces of The Allies shall be withdraw from Japan as soon as these objectives have been accomplished and there has been established in

³⁴ Gary H. Tsuchimochi, *Educational Reform in Postwar Japan* (Tokyo, 1993), hlm.89

³⁵ www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpbz198103/hpbz198103_2_167.html. diakses pada tanggal 20 Juli 2009 pada pukul 21.15.

³⁶ *Ibid*, hlm. 90

³⁷ *Ibid*, hlm. 91

accordance with the freely expressed will of the Japanese people a peacefull inclined and responsible government."³⁸

Terjemahan :

“Pasukan Pendudukan Sekutu harus ditarik dari Jepang segera setelah seluruh tujuan ini dicapai dan telah dibangunnya kedamaian dan pemerintahan yang bertanggungjawab berdasarkan keinginan orang-orang Jepang yang diekspresikan dengan bebas.”

Dari sudut pandang ini pemerintah Jepang percaya bahwa semakin cepat mereka menunjukkan kepada sekutu bahwa mereka telah menyelesaikan tujuan pasukan pendudukan, semakin cepat juga mereka mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan. Oleh karena itu pemerintah Jepang berusaha segera membuat kebijakan dalam bidang pendidikan yang lebih demokratis.

3.2 Pasal-pasal Yang Berhubungan Dengan Pendidikan di Dalam Konstitusi Jepang 1947 atau *Nihon Koku Kenpō* (日本国憲法).

Dalam usaha untuk membangun demokrasi di Jepang, SCAP selaku pemegang kekuasaan tertinggi di Jepang memerintahkan Pemerintah Jepang untuk merevisi Konstitusi Meiji. Pemerintah Jepang sebagai pelaksana, bekerja melalui komite yang dibentuk, berperan penting dalam membuat Konstitusi yang baru.

Peran pemerintah Jepang dalam memajukan pendidikan di Jepang menuju ke arah yang lebih baik dan demokratis juga terlihat melalui Konstitusi Jepang 1947 yang mereka susun. Sembilan pasal yang berkaitan dengan pendidikan, secara tidak langsung menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan di Jepang. Pasal-pasal tersebut antara lain :

1. Pasal 13 yang berbunyi :

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

“All of the people shall be respected as individuals. Their right to life, liberty, and the pursuit of happiness shall, to the extent that it does not interfere with public welfare, be the supreme consideration in legislation and in other governmental affair”.

³⁸ Occupation of Japan, Policy and Progress (New York, 1969), hlm.55

Pasal ini menyatakan bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan, selama tidak mengganggu kesejahteraan orang banyak, menjadi pertimbangan yang utama di dalam penyusunan undang-undang maupun di dalam urusan pemerintah. Pasal ini menjamin, di dalam penyusunan undang-undang, kebebasan masyarakat akan diperhatikan termasuk juga dalam mendapatkan pendidikan yang baik.

2. Pasal 14 yang berbunyi :

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

“All of the people are equal under the law and there shall be no discrimination in political, economic, and other social relations because of race, creed, sex, social status, or family origin...”

Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang sama di hadapan hukum dan tidak boleh ada diskriminasi ras, kepercayaan, Jenis kelamin, status sosial, atau pun keturunan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan hubungan sosial lainnya. Dengan demikian, setiap orang juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk juga kaum minoritas. Setiap masyarakat Jepang berhak mendapatkan pendidikan yang sama dan tidak ada diskriminasi.

3. Pasal 19 yang berbunyi :

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

“Freedom of thought and conscience shall not be violated”.

Pasal ini menyatakan bahwa pemerintah menjamin kebebasan dalam berfikir dan mengeluarkan suara hati.

4. Pasal 20 yang berbunyi :

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

“Freedom of religion is guaranteed to all. No religious organization shall receive any privileges from the States, nor exercise any political authority. No person shall be compelled to take part in any religious act, celebration, rite, or practice. The state and its organs shall refrain from religious education or any other religious activity...”

Dalam pasal ini pemerintah menjamin kebebasan beragama setiap warga negara. Berdasarkan pasal inilah pemerintah tidak akan campur tangan secara langsung dalam pendidikan keagamaan atau aktifitas keagamaan lainnya.

5. Pasal 23 yang berbunyi :

学問の自由は、これを保障する。

“Academic freedom is guaranteed...”

Dalam pasal ini pemerintah menjamin kebebasan akademis masyarakat. Masyarakat berhak untuk menentukan jenis pendidikan apa yang akan mereka ikuti.

6. Pasal 25 yang berbunyi :

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

“All people shall have the right to maintain the minimum standards of wholesome and cultured living. In all spheres of life, the States shall use its endeavors for the promotion and extension of social welfare and security and of public health”.

Dalam pasal ini pemerintah menjamin setiap masyarakat untuk mendapatkan kesehatan dan kehidupan yang layak. Dalam segala bidang, termasuk juga pendidikan, pemerintah mengusahakan peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

7. Pasal 26 yang berbunyi :

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

“All people shall have the right to receive an equal education correspondent to their ability, as provided by law. All people shall be obligated to have all boys and girls under their protection receive ordinary education as provided by law. Such compulsory education shall be free”.

Dalam pasal ini pemerintah menjamin setiap masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang sama sesuai dengan kemampuan mereka. Setiap warga negara juga mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban bagi putra dan putrinya untuk menerima pendidikan secara teratur seperti yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam *Kyōiku Kihon Hō* (教育基本法) atau Hukum Dasar Pendidikan Jepang diungkapkan bahwa masyarakat akan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan kemampuan mereka (pasal 3).³⁹ Dengan demikian, melalui kedua prinsip dasar pendidikan ini pemerintah menjamin kesetaraan bagi seluruh rakyat Jepang untuk memperoleh pendidikan. Melalui hal ini maka terdapat juga apa yang dinamakan *kakuritsubyōdō* (確立平等) atau kesetaraan. Kesetaraan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga untuk menikmati pendidikan, laki-laki maupun perempuan, pada usia yang sama, menerima pelajaran yang sama dengan jumlah waktu yang sama, sehingga semua siswa memiliki kemampuan yang sama tinggi untuk berkontribusi penuh dalam usaha memajukan bangsa.

8. Pasal 27 yang berbunyi :

すべて国民は、勤勞の権利を有し、義務を負ふ。賃金、就業時間、休息その他の勤勞条件に関する基準は、法律でこれを定める。児童は、これを酷使してはならない。

“All people shall have the right and the obligation to work. Standards for wages, hours, rest and other working condition shall be fixed by law. Children shall not be exploited...”.

Dalam pasal ini pemerintah menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan. Standar gaji, waktu kerja, istirahat, dan kondisi kerja lainnya ditetapkan oleh hukum. Pasal ini menjamin setiap guru untuk mendapatkan

³⁹ Herbert Pasin, *Society and Education in Japan*, (Tokyo, 1982), hlm.302

hak-hak mereka sebagai pekerja. Dan pasal ini juga melindungi anak-anak untuk tidak dieksploitasi, guna mendapatkan pendidikan yang layak.

9. Pasal 89 yang berbunyi :

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。⁴⁰
“No public money or other property shall be expended or appropriated for the use, benefit, or maintenance of any religious institution or association, or for any charitable, educational, or benevolent enterprises or not under the control of public authority”.

Dalam pasal ini pemerintah menjamin bahwa tidak ada uang masyarakat atau tanah milik masyarakat yang digunakan untuk keperluan ataupun keuntungan institusi-institusi atau perkumpulan-perkumpulan keagamaan, maupun untuk kegiatan amal, pendidikan, perusahaan, atau yang tidak berada di bawah kendali masyarakat banyak.

Melalui pasal-pasal yang dirumuskan oleh pemerintah Jepang inilah proses pendidikan di Jepang dijalankan. Pasal-pasal ini lah yang akan menjadi landasan di dalam penyusunan berbagai undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan di Jepang.

3.3 Komite Pendidikan Jepang

Untuk membantu perkembangan reformasi pendidikan di Jepang dan mengembangkan pendidikan yang bersifat demokratis dalam arti memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara Jepang dalam memperoleh pengetahuan serta memperoleh usulan-usulan kongkret dalam usaha perombakan pendidikan di Jepang, SCAP mengundang 27 pendidik Amerika Serikat dengan latar belakang yang berbeda-beda dari berbagai bidang dalam pendidikan datang ke Jepang pada bulan Maret 1946. Utusan Pendidikan Amerika Serikat ini tiba di Pangkalan Angkatan Udara Atsugi pada tanggal 5 Maret 1946. Utusan Pendidikan

⁴⁰ <http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/indices/docs/index-ENG.html>., diakses pada tanggal 30 Juni 2009 pukul 20.30. Penulis adalah Institute of Oriental Culture, University of Tokyo

Amerika Serikat ini dipimpin oleh George D. Stoddart dan bekerja kurang lebih selama satu bulan di Jepang.

Beberapa hal yang harus dipelajari oleh Utusan Pendidikan Amerika Serikat ini adalah :

1. Demokrasi pendidikan di Jepang, menyangkut masalah isi pendidikan, kurikulum, buku teks, panduan guru, dan media bantuan pembelajaran audio visual.
2. Psikologi di dalam pendidikan Jepang, menyangkut masalah reformasi pendidikan, pengembangan inisiatif siswa-siswi dan analisis kritis, dan orientasi guru.
3. Administrasi dalam pendidikan menyangkut masalah administrasi pendidikan Jepang, perombakan Kementerian Pendidikan Jepang, dan permasalahan dalam desentralisasi pendidikan.
4. Pendidikan tinggi di Jepang menyangkut masalah perpustakaan, arsip-arsip, laboratorium, museum, orientasi dalam pendidikan sosial, dan partisipasi dalam komunitas di Jepang.

Untuk membantu Utusan Pendidikan Amerika Serikat yang datang ke Jepang dalam rangka memperbaiki pendidikan di Jepang, maka SCAP mengusulkan kepada Pemerintah Jepang untuk membentuk Komite Pendidikan yang terdiri dari orang-orang yang ahli dalam bidang pendidikan di Jepang.

Pada tanggal 2 Februari 1946, berdasarkan usulan SCAP, Kementerian Pendidikan Jepang menunjuk 29 orang untuk menjadi anggota Komite Pendidikan Jepang ini. Komite ini berada di bawah Kementerian Pendidikan Jepang yang bekerjasama dengan Utusan Pendidikan Amerika Serikat. Ketua komite ini ditunjuk oleh setiap anggota komite. Staf Kementerian Pendidikan Jepang berhak untuk hadir dalam setiap pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh komite ini.

Pada tanggal 23 Februari 1946, Shigeru Nambara, Rektor dari Universitas Tokyo, ditunjuk sebagai ketua komite ini dan Shunsaku Kawahara ditunjuk sebagai wakilnya. Untuk selanjutnya komite ini dibagi menjadi 4 komite yang terdiri dari :

- A. Komite I : Risaku Mutai (ketua), Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Tokyo; Tetsuichi Sawato (wakil), Sekolah Menengah 5

Tokyo; Sanji Aruga, Kepala Sekolah *Tokyo Kodairi Youth School*; Michi Kawai, Kepala Sekolah *Keisen Women's College of Agriculture*; Toshikata Sano, Guru Besar Universitas Tokyo; Naomichi Shiono, Kepala Sekolah Sekolah Guru Kanazawa; Taketoshi Yamagiwa, Kepala Sekolah SD Nishida Tokyo; Muneyoshi Yanagi, Direktur *Nihon Mingeikan*.

B. Komite II : Masatsugu Ando (ketua), Rektor Universitas Taihoku; Mantaro Kido (wakil), dari Institut Pelatihan Pendidikan; Manjiro Hasegawa, dari *Jo Zekan* (kritik seni); Michio Kuzaki, Pastor; Sumie Kobayashi, Profesor Universitas Keio; Sozo Kurahashi, Profesor Sekolah Guru Wanita Tokyo; Taro Ochiai, Profesor Universitas Kyoto; Naoteru Ueno, Rektor Universitas Seni Tokyo.

C. Komite III : Shunsaku Kawahara (Ketua), Privy Councillor; Tsuraki Yano (wakil), Presiden *Meiji Gakuin College*; Teiyu Amano, Kepala Sekolah SMU Daiichi; Suteji Kumaki, Kepala Sekolah Sekolah Guru Daiichi; Masanori Oshima, Guru Besar Universitas Tokyo.

D. Komite IV : Toyotaka Komiya (ketua), Kepala Sekolah Sekolah Musik Tokyo; Teizo Toda (wakil), Profesor Universitas Tokyo; Kimio Hayashi, Wakil Pimpinan Universitas Waseda; Kosaku Kakinuma, Profesor Universitas Tokyo; Ai Hoshimo, Kepala Sekolah Sekolah Kejuruan Tsuda; Yosaka Takagi, Profesor Universitas Tokyo; Risaburo Torikai, Profesor Universitas Kyoto.⁴¹

Setiap komite dalam Komite Pendidikan Jepang ini mempunyai tugas yang berbeda-beda, disesuaikan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Utusan Pendidikan Amerika Serikat. Masing-masing komite dalam Komite Pendidikan Jepang ini mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Komite I : membahas isu-isu penting

1. membahas tugas pendidikan pada tiap sekolah : merevisi peraturan sekolah
2. mereformasi kualitas pendidikan : mendiskusikan isi pelajaran dan kurikulum

⁴¹ Gary H. Tsuchimochi, *op cit.*, hlm.96-97

3. mempelajari masalah naskah pendidikan yang dikeluarkan lembaga kekaisaran
 4. mendiskusikan kompilasi buku-buku teks
 5. mendiskusikan administrasi buku teks
 6. membahas masalah pedoman guru-guru
 7. mempelajari peralatan audiovisual
 8. meneliti dan menyusun bahan-bahan yang berkaitan dengan reformasi pada tiap sekolah
 9. mendiskusikan pendidikan seni
 10. mendiskusikan pendidikan olah raga
 11. mendiskusikan pendidikan keahlian
- B. Komite II : membahas masalah-masalah penting.
1. membahas tugas dan tujuan pendidikan
 2. membahas masalah bahasa Jepang
 3. mempelajari demokratisasi dalam metode pengajaran
 4. mengevaluasi hasil pendidikan Jepang
 5. membahas partisipasi siswa-siswi dan guru dalam pendidikan di sekolah
 6. mempelajari kegiatan relawan murid-murid
 7. mempelajari kondisi institusi pendidikan Jepang
 8. mendidik kembali para guru
 9. melihat hubungan antara pendidikan dan agama
 10. membahas pendidikan khusus bagi para murid yang tuna wicara dan tuna daksa.
- C. Komite III : masalah yang berhubungan dengan komite.
1. membahas kewenangan dalam bidang pendidikan
 2. mengorganisasi ulang sistem sekolah
 3. meninjau kembali setiap tujuan kebijakan sekolah
 4. mereformasi sistem ujian masuk dan biaya yang dibutuhkan
 5. membahas peningkatan status dan gaji guru
 6. membahas pendidikan para guru
- D. Komite IV
1. membahas sistem universitas

2. membahas sistem sekolah swasta
3. membahas kesempatan pekerjaan bagi para lulusan
4. membahas pendidikan agama
5. membahas universitas bagi wanita
6. membahas sekolah-sekolah tambahan
7. melakukan penelitaian mengenai fasilitas-fasilitas pendidikan dan perpustakaan-perpustakaan.⁴²

Utusan Pendidikan Amerika Serikat yang bekerjasama dengan Komite Pendidikan Jepang setelah satu bulan bekerja, menghasilkan rekomendasi yang diserahkan kepada SCAP melalui *Civil Information and Education* (CIE) atau Badan Informasi dan Pendidikan Publik. Rekomendasi ini akan dijadikan landasan dalam memperbaiki pendidikan di Jepang. Dalam rekomendasi Utusan Pendidikan Amerika Serikat ini disebutkanlah tujuan dan isi pendidikan Jepang, yang antara lain adalah :

1. Desentralisasi pendidikan.

Desentralisasi sangat penting agar memberikan para guru kebebasan untuk mengembangkan profesionalitas mereka, sehingga mampu menjalankan fungsi mereka dalam mengembangkan kemampuan orang-orang Jepang secara bebas.

2. Kurikulum pendidikan

Kurikulum pendidikan harus berisi tidak hanya sebuah bentuk pengetahuan, tetapi juga termasuk dalam kegiatan fisik dan mental para siswa. Hal ini harus diterapkan melalui kerjasama yang melibatkan para guru dengan memberikan pengalaman dan kemampuan mereka.

3. Moral

Moral harus dibentuk dengan menyentuh setiap fase dalam kehidupan manusia. Dalam hal yang lebih luas, moral adalah kehormatan yang menegakkan persamaan, saling memberi dan menerima dalam pemerintahan yang demokratis, hubungan kerjasama yang baik didalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal ini harus diajarkan, dan dikembangkan di dalam setiap bentuk kegiatan dan program di sekolah-sekolah.

⁴² *Ibid.*, hlm.96

4. Penulisan ulang buku-buku sejarah dan geografi

Buku yang menyentuh bidang geografi dan sejarah harus ditulis ulang untuk memberikan penjelasan alasan buku tersebut ditulis, dan memberikan pandangan yang lebih luas dan objektif.

5. Pendidikan olah raga dan instruksi kesehatan menjadi dasar dari seluruh program pendidikan.

Pemeriksaan kesehatan, penyuluhan kesehatan dan gizi, perluasan pendidikan olah raga serta pembuatan ulang program dalam tingkat universitas, serta pembaharuan alat-alat kesehatan dan olah raga harus dilakukan segera.

6. Pendidikan Kejuruan.

Pendidikan kejuruan harus diberikan perhatian yang penuh. Berbagai macam keahlian sangat dibutuhkan di Jepang, dan harus diawasi oleh pelatih profesional, dengan menekankan pada pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta seni. Keahlian memahat batu dan kayu juga harus mendapat tempat di dalam program sosial dan juga diberikan kesempatan dalam berkreativitas.

Dalam perombakan struktur organisasi pendidikan di Jepang, lebih khusus lagi Utusan Pendidikan Amerika Serikat ini merekomendasikan beberapa hal yaitu :

1. Perluasan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dilaksanakan dengan meningkatkan standar pendidikan wajib menjadi 9 tahun, membebaskan biaya pendidikan 6 sampai 9 tahun, menambah jumlah dan kapasitas universitas serta memperluas serta liberalisasi kurikulum universitas, dan menyediakan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan bagi semua orang tanpa memperhatikan jenis kelamin dan kedudukan.
2. Penyederhanaan dan standarisasi dilakukan dengan merubah sistem pendidikan 6-5-3-3 yang ada (sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atas, universitas), dengan sistem 6-3-3-4 (sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas) yang juga dipakai di Amerika Serikat.

3. Desentralisasi dilakukan dengan mendirikan dewan pendidikan yang dipilih melalui voting di tiap prefektur dan tingkat daerah untuk memegang kendali atas sekolah dasar dan sekolah menengah negeri. Kementerian Pendidikan Jepang melahirkan ketentuan-ketentuan teknis dan nasihat-nasihat yang profesional kepada dewan ini.⁴³

Dalam laporan rekomendasinya, Utusan Pendidikan Amerika juga membahas masalah reformasi bahasa. Masalah di dalam penulisan bahasa merupakan hal mendasar dalam setiap pembaharuan dalam pendidikan praktis. Mereka menyarankan bahwa bentuk tulisan Romaji harus dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Utusan Pendidikan Amerika Serikat mengusulkan untuk segera dibentuk komisi yang terdiri dari petinggi-petinggi pendidikan di Jepang, dan orang-orang pemerintahan guna terselesaikannya beberapa program dalam pendidikan dalam waktu dekat. Di dalam memutuskan bentuk tulisan Romaji yang akan digunakan, komisi ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan program reformasi bahasa selama masa transisi,
2. merumuskan rencana untuk memperkenalkan tulisan Romaji ke sekolah-sekolah Jepang dan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui koran-koran, buku-buku, majalah, dan sebagainya,
3. mempelajari cara menjadikan bahasa percakapan lebih demokratis

Untuk terciptanya demokrasi dalam bidang pendidikan, Komite Pendidikan Jepang bersama-sama dengan Utusan Pendidikan Amerika Serikat juga merekomendasikan agar kendali atas sekolah-sekolah harus seluas-luasnya lebih diberikan kepada daerah setempat dari pada dipusatkan seperti masa sebelum pendudukan. Kementerian Pendidikan Jepang di dalam rekomendasi ini, memiliki tugas penting dalam menyediakan bantuan teknis kepada sekolah-sekolah, tetapi kendali langsung Kementerian Pendidikan Jepang atas sekolah-sekolah dibatasi. Selain itu, disarankan juga untuk membentuk badan-badan pendidikan di tingkat daerah maupun prefektur. Badan pendidikan tersebut

⁴³ Robert A. Fearey, *op. cit.*, hlm.34-35

diberikan wewenang untuk mengesahkan sekolah-sekolah, sertifikasi para guru, serta pemilihan buku-buku teks.

Komite Pendidikan Jepang yang dibentuk oleh pemerintah Jepang berdasarkan usulan SCAP ini, setelah Utusan Pendidikan dari Amerika Serikat pulang ke negaranya, tetap melanjutkan tugas-tugasnya dalam mempelajari setiap masalah pendidikan Jepang serta memberikan laporan secara berkala kepada SCAP melalui CIE atau *Civil Information and Education* (Badan Informasi dan Pendidikan Publik).

3.4 Pembentukan *Kyōiku Sasshin Iinkai* (教育刷新委員会) atau Dewan Pembaharuan Pendidikan

Untuk merealisasikan rekomendasi yang telah dibuat oleh Utusan Pendidikan Amerika Serikat bersama dengan Komite Pendidikan Jepang, maka pada tanggal 9 Agustus 1946 dikeluarkanlah peraturan pemerintah untuk membentuk Dewan Pembaharuan Pendidikan Jepang atau *Kyōiku Sasshin Iinkai* (教育刷新委員会). Dewan ini terdiri dari 49 anggota dari masyarakat sipil Jepang. Dewan ini juga mempunyai kedudukan yang setara dengan Kementerian Pendidikan Jepang dan berada di bawah bimbingan Civil Information and Education of SCAP (CIE) atau Badan Informasi dan Pendidikan SCAP.⁴⁴

Dewan ini di bawah bimbingan CIE memutuskan bahwa pendidikan yang baru harus dilaksanakan oleh komunitas di daerah-daerah, badan sekolah, dan sekolah-sekolah yang memiliki hubungan secara langsung dengan masyarakat di tiap-tiap daerah. Selain itu Dewan ini juga menyusun Hukum Dasar Pendidikan Jepang 1947 atau *Fundamental Law of Education 1947* atau *Kyōiku Kihon Hō* (教育基本法).

Hukum Dasar Pendidikan Jepang ini merupakan hukum dasar yang mengatur kebijakan dan tujuan umum pendidikan di Jepang. Hukum ini terdiri dari 11 pasal, dan dalam pembukaannya dimulai dengan sebuah komitmen untuk berkontribusi dalam perdamaian dunia dan kesejahteraan masyarakat dengan membangun negara yang demokratis dan berbudaya, yang berpegang pada sebuah pengetahuan bahwa hal ini bergantung pada pendidikan dalam pelaksanaannya.

⁴⁴ William K. Cummings, *Education and Equality in Japan* (New Jersey : 1980), hlm.32

Pasal pertama dalam Hukum Dasar Pendidikan ini menyatakan tujuan dari pendidikan Jepang sebagai pengembangan secara penuh kepribadian masyarakat, pikiran dan tubuh yang sehat, yang mencintai kejujuran dan kebenaran, menghargai nilai-nilai individu, menghormati pekerjaan, dan mempunyai rasa tanggung jawab yang dalam, sebagai pendorong untuk membangun negara dan masyarakat yang damai.⁴⁵

Pasal-pasal lainnya dalam Hukum Dasar Pendidikan ini membahas mengenai kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, bantuan dana untuk siswa-siswi yang membutuhkan, pendidikan gratis untuk pendidikan wajib sembilan tahun, arti dan batas-batas dalam pendidikan politik, pendidikan sekolah, jaminan perlakuan yang adil bagi para guru, institusi-institusi sekolah, pemisahan antara agama dan pendidikan, dan administrasi pendidikan yang demokratis.

Berdasarkan Hukum Dasar Pendidikan 1947 atau *Kyōiku Kihon Hō* (教育基本法), pemerintah juga membentuk dan mengumumkan *Gakkō Kyōiku Hō* (学校教育法) atau Undang-Undang Pendidikan Sekolah. Selanjutnya dari kedua Undang-Undang tersebut diaturlah prinsip dasar sistem sekolah di Jepang dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Kesempatan yang sama dalam pendidikan,
2. Pembentukan sistem pendidikan 6-3-3-4, yaitu :
 - 1) 6 tahun masa studi untuk jenjang *shōgakkō* (小学校) atau sekolah dasar.
 - 2) 3 tahun *chūgakkō* (中学校) atau sekolah menengah pertama.
 - 3) 3 tahun *kōtōgakkō* (高等学校) atau sekolah menengah atas.
 - 4) 4 tahun jenjang perguruan tinggi.

Selain itu ada juga *yōchien* (幼稚園) atau taman kanak-kanak, 5 tahun *senmongakkō* (専門学校) atau sekolah kejuruan untuk lulusan sekolah menengah pertama, dan sekolah luar biasa untuk siswa dengan kebutuhan khusus.

3. Pendidikan wajib diperpanjang menjadi 9 tahun yaitu 6 tahun sekolah dasar dan 3 tahun sekolah menengah pertama yang wajib diikuti oleh anak

⁴⁵ *Kodansha Ensiklopedia of Japan*, hlm.178

laki-laki dan perempuan dengan menggunakan kurikulum yang sama bagi semua siswa.

Dengan didesentralisasikannya pendidikan Jepang, maka untuk mengatur pendidikan di tiap-tiap daerah sesuai dengan Hukum Dasar Pendidikan dan Undang-Undang Dasar Sekolah, disusunlah Undang-undang Dewan Pendidikan Jepang atau *Kyōiku Iinkai Hō* (教育委員開法) pada tanggal 15 Juli 1948. Undang-undang ini bertujuan untuk mencapai tujuan utama pendidikan dengan mendirikan Dewan Pendidikan yang mengelola pendidikan berdasarkan kehendak rakyat dan yang sesuai dengan kondisi daerah setempat, dengan menyadari bahwa pendidikan harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat.

Dalam undang-undang ini juga diatur tugas-tugas Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan Prefektur memegang kendali atas seluruh sekolah dan institusi-institusi lainnya yang didirikan oleh prefektur yang bersangkutan, dan Dewan Pendidikan Lokal memegang kendali atas seluruh sekolah yang didirikan oleh badan daerah setempat. Selain itu, Badan Pendidikan Jepang juga bertanggungjawab atas persoalan-persoalan berikut :

1. pembangunan, kendali, dan penutupan sekolah-sekolah dan institusi-institusi pendidikan lainnya
2. isi kurikulum yang akan diajarkan
3. pemilihan buku-buku teks
4. pendidikan sosial
5. pendidikan dan pengembangan diri para kepala sekolah, guru-guru, dan pendidik profesional lainnya
6. lain-lainnya yang berkaitan dengan urusan pendidikan.⁴⁶

Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi kepala sekolah dan guru-guru; persetujuan buku-buku teks yang akan digunakan di prefektur tersebut, yang sesuai dengan standar yang diberikan Kementerian Pendidikan Jepang; bantuan teknis kepada Dewan Pendidikan Lokal menjadi tanggung jawab Dewan Pendidikan Prefektur secara khusus.

⁴⁶ Edward R. Beauchamp, *Japanese Education Since 1945, a Documentary Study* (London : 1994), hlm.118

Dalam melaksanakan perintah SCAP untuk merealisasikan rekomendasi yang dihasilkan oleh Utusan Pendidikan Amerika Serikat, Pemerintah Jepang melalui *Kyōiku Sasshin Inikai* atau Dewan Pembaharuan Pendidikan berhasil merumuskan *Kyōiku Kihon Hō* atau Hukum Dasar Pendidikan dan *Gakkō Kyōiku Hō* (学校教育法) atau Undang-Undang Pendidikan Sekolah yang mengatur kehidupan pendidikan di Jepang.

3.5 Pembentukan Garis Besar Panduan Belajar atau *Gakushishūdōryō* (学士修道要領).

Pada tahun 1951 Pemerintah Jepang melalui Kementrian Pendidikan Jepang berperan dalam memperkenalkan *Gakushishūdōryō* (学習指導要領) atau Garis Besar Panduan Belajar yang memuat :

1. daftar pelajaran,
2. jumlah jam belajar,
3. cara-cara pengajaran yang digunakan sebagai pedoman proses belajar di kelas.

Garis Besar Panduan Belajar ini juga memberikan hak kepada tiap sekolah untuk menentukan sendiri kurikulum yang digunakan, tentunya dengan tetap berpegang pada panduan belajar yang telah dikeluarkan pemerintah dan sesuai dengan kondisi daerah dan kebutuhan siswa sekolah tersebut. Garis Besar Panduan Belajar sekolah Jepang memuat landasan pendidikan yang menekankan pada sistem belajar berbasis pengalaman dan dibagi menjadi empat pendidikan utama yaitu :

1. teknik (bahasa dan aritmatika)
2. pelajaran untuk memupuk kreativitas (musik, menggambar, keterampilan rumah tangga)
3. masyarakat dan lingkungan (ilmu sosial)
4. kesehatan (olah raga)

Garis Besar Panduan Belajar atau *Gakushishūdōryō* (学習指導要領) diresmikan pada tahun 1958